

**PROGRAM PEMERINTAH MELALUI PNPM MANDIRI  
PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYRAKAT  
(STUDI DESA BAKTI KECAMATAN PONRANG SELATAN  
KABUPATEN LUWU)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Mukrima Risal**  
16 0402 0144

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPALOPO  
2020**

**PROGRAM PEMERINTAH MELALUI PNPM MANDIRI  
PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYRAKAT  
(STUDI DESA BAKTI KECAMATAN PONRANG SELATAN  
KABUPATEN LUWU)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing :**

- 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.**
- 2. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPALOPO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukrima Risal

Nim : 16 0402 0144

Program studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 10 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,



**Mukrima Risal**  
**NIM. 1604020144**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Upaya Pemerintah Melalui PNPM Mandiri pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh Mukrima Risal Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0144, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Palopo, yang dimunaqashakan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan 13 Shafar 1442 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Palopo, 28 November 2020

### TIM PENGUJI

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.               | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.        | Penguji I         | (.....) |
| 4. Ilham, S.Ag., M.A.                    | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.               | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.             | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M., M.M. ✗  
NIP 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Henra Safri, S.E., M.M.  
NIP 19861020 201503 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: “Program Pemerintah Melalui PNPM Mandiri Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)”

Yang ditulis oleh:

Nama : Mukrma Rival  
NIM : 16 0402 0144  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.  
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I

  
Dr. Hj. Ratniah M., M.M.  
NIP. 196100208 19943 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: “Program Pemerintah Melalui PNPM Mandiri Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)”

Yang ditulis oleh:

Nama : Mukrima Risal  
NIM : 16 0402 0144  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.  
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya



Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurdin Batjo'.

**Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.**  
NIDN. 0903027601

Dr. Hj.Ramlah M., M.M.  
Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Palopo, 01 september 2020

Lamp :  
Hal : Skripsi Mukrima Risal

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum warohmanullahi wabarakatu*

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mukrima Risal

NIM : 16 0402 0144

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Program Pemerintah Melalui PNPM Mandiri Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb*

Pembimbing I



Dr. Hj. Ramlah M., M.M.  
NIP. 196100208 19943 2 001

Pembimbing II



Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.  
NIDN. 09003027601

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
Ilham, S.Ag., M.A.  
Dr. Hj. Ramlah M., M.M.  
Nurdin Batjo., S.Pt., M.M.

---

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :  
Hal : Skripsi Mukrima Risal

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mukrima Risal

NIM : 16 0402 0144

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Program Pemerintah Melalui PNPM Mandiri Pada

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Bakti Kecamatan Pnrang Selatan Kabupaten Luwu)

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *muqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu "alaikum wr.wb*

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur., M.Ag<br>Penguji I    | ( )<br>tanggal : |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A<br>Penguji II                | ( )<br>tanggal : |
| 3. Dr. Hj. Ramlah M., M.M<br>Pembimbing I/Penguji | ( )<br>tanggal : |



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp        :-

Hal         : Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah *skripsi* sebagai berikut:

Nama                : Mukrima Risal  
NIM                 : 16 0402 0144  
Program Studi     : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi       : Upaya Program PNPM Mandiri Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (DESA BAKTI KEC. PONRANG SELATAN KAB. LUWU)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Dr. Adzaan Noor Bakri, M.A.,Ek  
Tanggal:
2. Purnama Sari, SE  
Tanggal:



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala limpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sederhana, guna melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, bantuan, bimbingan, petunjuk-petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak yang kesemuanya ini sangat membantu penulis dalam rangka menyusun skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan dengan baik. Terkhusus untuk orang tua tercinta, Ayahanda Maman Suryaman serta ibu Roslia yang telah melahirkan dan membesarkan penulis. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka.

Dan taklupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, SH., M.H., Wakil Rektor II, Ahmad Syarif Iskandar,

M.M., dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberikan pelajaran pembinaan, kepada penulis dalam menyusun dan menimba ilmu pengetahuan

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Hj. Ramlah Makulasse, M.M., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., C.A Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Dr. Takdir, S.H., M.H.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah, Hendra Safri, SE., M.M dan beserta para dosen, asisten dosen prodi Perbankan Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, H. Madehang, S. Ag., M.Pd., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. selaku pembimbing I dan Nurdin Batjo, S.Pt., M.M., selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat menyusun skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Ilham, S.Ag., MA selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., MA.selaku Dosen Penasehat Akademik.

8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Risal dan ibunda Ruskiati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt.mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

9. Teman-teman Perbankan Syariah, terkhusus teman-teman Perbankan Syariah D angkatan 2016, antara lain Nurmilasari R, Ratna Anjani, Nining Herawati, Warnia Nengsi dan Novita Sari, yang telah banyak membantu saat bekerja sama selama penulis menuntut ilmu di IAIN Palopo mulai tahun 2016 sampai sekarang.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan.Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus.

Palopo, 10 Maret 2020

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### ***A. Transliterasi Arab-Latin***

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṡad	Ṡ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
او	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*  
هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
رَامَى : *rāmā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُؤْمِنُ	: <i>nu'immu</i>
عُدُّوْا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau Arabiy)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* ( ْ ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>



## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarah al-Arba'in al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'ayah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilāih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *diinulāh*      بِاللَّهِ *billāh*

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

*hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:



*Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wudi'a limmāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*  
*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*  
*Nasr Hāmid Abū Zayd*  
*Al-Tūfī*  
*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad  
Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,  
Zaīd Nasr Hāmid Abū

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
MI	= Madrasah Ibtidaiyah
MTS	= Madrasah Tsanawiyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
B. Deskripsi Teori.....	14
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri .....	14
2. Pemberdayaan dalam Perspektif Islam .....	21
3. Kesejahteraan .....	25
C. Kerangka Pikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Definisi Istilah.....	32
C. Subjek Penelitian.....	33

D. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	35
G. Pedoman Wawancara.....	36
H. Jadwal Kegiatan .....	36
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>38</b>
A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian.....	38
1. Gambaran Geografis Desa Bakti.....	39
2. Kondisi Geografis Penduduk Desa Bakti.....	40
3. Struktur Pemerintah Desa bakti.....	41
4. Potensi dan Masalah Ekonomi Masyarakat Desa Bakti.....	41
5. Kondisi Objektif PNPM Mandiri di Desa Bakti .....	44
B. Program pemerintah melalui PNPM Mandiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bakti .....	51
1. Program Kerja Bidang Infrastruktur .....	53
2. Program Kerja Bidang Ekonomi.....	58
C. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Program PNPM Mandiri di Desa Bakti.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS al Hasyr/59: 7 .....	6
Kutipan Ayat QS al ar-Ra'd/13:11.....	21
Kutipan Ayat QS al-Anbiya/21:107.....	28



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Tahap Persiapan Penelitian .....	36
Tabel 3.2. Jadwal Kegiatan Tahap Pelaksanaan Penelitian .....	36
Tabel 3.3. Jadwal Kegiatan Tahap Akhir Penelitian.....	37
Tabel 4.1. Nama Kepala Desa Dari Tahun 1958-Sekarang.....	38
Tabel 4.2. Batas-batas Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu.....	40
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk 2010-2015 Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu .....	41
Tabel 4.4 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu.....	42
Tabel 4.5 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu .....	43
Tabel 4.6 Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Desa Bakti .....	49
Tabel 4.7 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Dusun Lanipa I dan Dusun Lanipa II Desa Bakti.....	50
Tabel 4.8 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Dusun Tondo Tangga dan Dusun Syuhada Desa Bakti .....	50
Tabel. 4.9. Program Kerja PNPM Di Desa Bakti .....	51
Tabel. 4.10. Kondisi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bakti .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 2019.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	31
Gambar 4.1 Peta Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu.....	39
Gambar 4.2 Struktur Pemerintah Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu .....	39
Gambar 4.3 Struktur Personalia UPK Kecamatan Ponrang Selatan.....	41





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Nota Dinas
- Lampiran 5 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 7 Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 8 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 Turnitin
- Lampiran 10 Verifikasi
- Lampiran 11 Riwayat hidup



## ABSTRAK

**Mukrima Risal, 2020.** *“Program pemerintah melalui PNPM Mandiri Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ramlah M dan Nurdin Batjo.

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui Program pemerintah melalui PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat desa Bakti kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu dalam program PNPM Mandiri. Untuk mengembangkan penelitian ini, digunakan desain penelitian kualitatif, penelitian ini berusaha menguraikan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan skripsi ini adalah PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu dilakukan dengan mengimplementasikan dua jenis program yaitu, 1) Program Kerja di Bidang Infrastruktur, a) Pembangunan Saluran Drainase Bagi Petani, b) Pengerasan Jalan Pertanian dan Pemukiman Masyarakat c) Jembatan, d) Pendirian Taman Kanak-kanak, d) Pembangunan Posyandu . 2) Program Kerja di Bidang Ekonomi, a) Penyaluran dana kepada kelompok usaha ekonomi produktif, b) Penyaluran dana kepada kelompok simpan pinjam perempuan. Kondisi kesejahteraan masyarakat miskin desa Bakti kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu dalam program PNPM Mandiri, dapat disimpulkan bahwa PNPM mandiri membantu memberikan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang telah di implementasikan mulai dari membangun sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan akses pertanian serta bantuan dana untuk pengembangan usaha bagi pelaku ekonomi. PNPM mandiri di desa Bakti sudah memberikan kebutuhan dasar dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang berkelanjutan. Dengan adanya PNPM mandiri di desa Bakti banyak kegiatan-kegiatan yang dulunya sangat sulit dan bahkan tidak bisa dilakukan, saat ini masyarakat desa Bakti secara bersama-sama dapat merasakan langsung hal tersebut.

**Kata Kunci:** PNPM Mandiri, Kesejahteraan.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah. Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat (teori Nurke).<sup>1</sup>

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang sudah ada sejak lama dan hampir bisa dikatakan menjadi “kenyataan abadi” dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemiskinan sendiri merupakan suatu konsep ilmiah yang lahir sebagai dampak dari istilah pembangunan yang kurang merata. Oleh karena itu dalam setiap hal yang membahas tentang pembangunan, maka pembahasan kemiskinan mendapatkan tempat yang cukup penting dan substansi untuk dijadikan rujukan pembangunan. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah dalam

---

<sup>1</sup> Rubiyana dkk, “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam Penanggulangan Kemiskinan (Kasus Pada Program Pinjaman Bergilir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)”, *Jurnal Management*, Vol. 2, No.2 (Maret 2016), 3.

pembangunan, yang keberadaanya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkatkan menjadi ketimpangan. Dalam decade terakhir, kemiskinan menjadi suatu topic yang terus dibahas baik dalam forum-forum nasional ataupun internasional, banyak fakta yang menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan masih gagal untuk memberantas hal tersebut apalagi pada tatarana negara-negara berkembang.<sup>2</sup>

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.<sup>3</sup>

Sifat dasar kemiskinan amatlah kompleks dan faktor-faktor penyebabnya amat beragam. Kaum miskin mungkin tidak memiliki aset maupun kemampuan yang bersifat esensial karena mereka tinggal di daerah yang terpencil, rawan konflik, dan mempunyai sumberdaya sangat terbatas. Orang-orang ini mungkin rentan karena usia, kesehatan, lingkungan tempat tinggal, ataupun pekerjaan. Dalam tingkatan yang lebih luas, kemiskinan mungkin berasal dari situasi dimana ada ketimpangan yang besar secara terus-menerus akibat dari kepentingan dan struktur kekuasaan yang cenderung mempertahankan kewenangan (*statusquo*). Keanekaragaman kondisi dan sebab-sebab kemiskinan tersebut

---

<sup>2</sup> Yoghi Citra Pratama “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 04, No.02 (Agustus 2014), 210.

<sup>3</sup> Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau” *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22, No. 2 (Juni 2014), 2.

mengisyaratkan bahwa intervensi-intervensi untuk mengurangi kemiskinan harus disesuaikan menurut keadaan-keadaan tertentu.<sup>4</sup>

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak.

Masalah kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Masalah kemiskinan di Indonesia tercermin dari kondisi fisik masyarakat yang tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standard kelayakan untuk ditempati, serta mata pencarian yang tidak menentu.

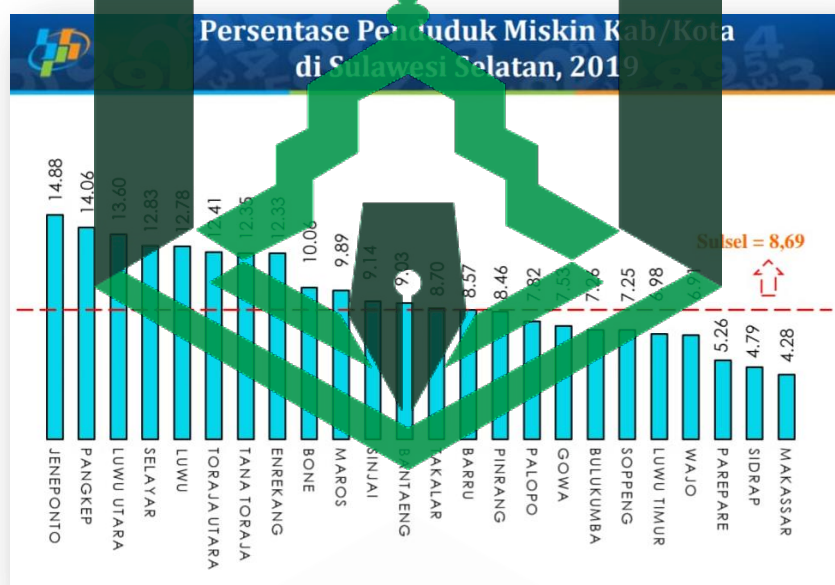
Dewasa ini kemiskinan pedesaan menjadi masalah utama dalam proses pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan, karena sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan dan karakteristik penyebab kemiskinan struktural yang dialami sangat banyak. Selain itu kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran pembangunan yang lebih besar di daerah perkotaan dari pada daerah pedesaan, merupakan salah satu faktor penyebab daerah pedesaan semakin tertinggal dan kemiskinan struktural semakin bertambah di daerah

---

<sup>4</sup> Yustinus Farid Setyobudi, "Pengetasan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri" *Jurnal Dimensi*, Vol. 1. No. 3 (2016), 1.

pedesaan.<sup>5</sup>Permasalahan kemiskinan ini telah menggugah pemerintah dan sebagai lembaga internasional seperti bank dunia dan lain-lain untuk berperan aktif mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program.Beberapa program cenderung persial dan tidak berkelanjutan.Untuk itu, diperlukan perubahan byang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penganggulangan kemiskinan.

Tercatat dalam data Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2019 yang secara resmi dirilis oleh BPS Sulawesi Selatan dan penulis kutip dari situs resmi pemerintah kabupaten Bulukumba, bahwa kabupaten Luwu tercatat menduduki peringkat ke-5 dengan persentase 12.78%, setelah Selayar, Luwu Utara, Pangkep dan Jenepono yang berada di peringkat ke-1.<sup>6</sup>



Gambar1.1Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2019

Pemerintah kabupaten Luwu pada tahun 2020, menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,72 % dengan mengusung program pembangunan

<sup>5</sup> Cica Sartika, dkk, “Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 01, No. 01, (April 2016), 106.

<sup>6</sup> Pemerintah Kabupaten Bulukumba, <https://bulukumbakab.go.id/rubrik/angka-kemiskinan-kabupaten-bulukumba-menurundiakses> pada 24 Desember 2019 pukul 17.09.

optimalisasi sumber daya dalam pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal.<sup>7</sup> Hal ini merupakan angin segar bagi masyarakat luwu menuju kesejahteraan. Penanggulangan kemiskinan memanglah hal yang sangat sulit untuk diselesaikan, apabila seluruh perangkat yang mendukung pembangunan apakah pemerintah dan masyarakat tidak dapat bersinergi.

Dewasa ini memang penanggulangan masyarakat miskin pedesaan menjadi fokus pemerintah pusat, dana yang digolontorkan oleh pemerintah tidak tanggung-tanggung kepada pemerintah desa demi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Disisi lain terdapat dana yang berasal dari Program Nasional Pemberdayaan Manusia Mandiri atau yang biasa disebut dengan PNPM Mandiri, dimana dana dari program ini pemerintah desa harus taat mengikuti pendamping PNPM Mandiri yang ada.

Secara sederhana memang telah banyak metode yang di jadikan solusi oleh pemerintah, namun hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi peneliti, apakah memang metode ini cocok dan efektif dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat desa, ataukah hal ini hanya menjadi program yang nantinya dapat merugikan negara.

Pemberdayaan masyarakat merupakan metode yang cukup efektif untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan atau paling tidak mencegah munculnya masalah-masalah turunan dari kemiskinan seperti busung lapar, kurang gizi, anak

---

<sup>7</sup>Pemerintah Kabupaten Luwu, "Tahun 2020, Pemkab Luwu Targetkan Angka Kemiskinan Turun 0,72 Persen" <http://mediacenter.luwukab.go.id/tahun-2020-pemkab-luwu-targetkan-angka-kemiskinan-turun-072-persen/>, dikutip pada 24 Desember 2019, pukul 19.22.

putus sekolah, bayi terlantar, anak jalanan, kondisi lingkungan pemukiman yang buruk, kriminalitas dan prostitusi.<sup>8</sup>Masalahnya, dibutuhkan komitmen jangka panjang untuk memfasilitasi kesinambungan dari upaya pengembangan masyarakat yang berjalan, agar target jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan dapat menjadi kenyataan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin (PNPM Mandiri) merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program PNPM Mandiri ini merupakan system dan pola dari proses perubahan yang direncanakan untuk memberdayakan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Program ini padat hakikatnya merupakan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan semua komponen masyarakat. Kegiatan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat miskin merupakan hal yang telah di legitimasi oleh Allah Swt dalam Qs. Al-Hasyr: 7.

وَالْيَتَامَىٰ الْقُرْبَىٰ وَلِذِي الرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرْبَىٰ أَهْلٌ مِّن رَّسُولِهِ عَلَىٰ اللَّهِ أَفَاءٌ مَّا  
 الرَّسُولُ ءَاتَاكُمْ وَمَا مِّنْكُمْ أَغْنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ إِنَّ اللَّهَ أَتَقْوَىٰ ۖ فَانْتَهَوْا عَنْهُ نَهْيَكُمْ وَمَا فَخْذُوهُ

Terjemahnya:

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang*

<sup>8</sup> Abu Huraerah, *pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2011), 187.



*misikin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.<sup>9</sup>*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa pembangunan masyarakat yang ideal dapat dilakukan dengan pembangunan yang merata, yang menciptakan kondisi dimana semua orang dapat merasakan dampak positif dari seluruh kegiatan yang dilakukan dari pembangunan masyarakat. Adapun kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri tersebut dapat berupa kegiatan dana bergulir, beasiswa, santunan, dan pembuatan sarana dan prsarana maupun perbaikan jalan. Dana PNPM Mandiri tersebut berasal dari bank dunia yang kemudian disalurkan ke APBD yang penggunaanya dan penyalurannya harus dipertanggung jawabkan oleh Negara.<sup>10</sup>

PNPM Mandiri adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, yang menitikberatkan pada upaya penguatan BKM (badan keswadayaan masyarakat) sebagai organisasi masyarakat yang mampu berperan sebagai penggerak upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan temuan-temuan sementara di atas, penulis merasakan urgennya mengangkat tema ini sebagai objek penelitian, karena dengan mengetahui penyelesaian dari masalah ini akan membawa dampak yang besar

---

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (.....).

<sup>10</sup>Wikipedia *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan* [https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM\\_Mandiri\\_Pedesaan](https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan) (dikutip pada 25 Desember 2019, pukul 20.00.)

bagi program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Program Pemerintah Melalui PNPM Mandiri Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini dibuat sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan gambaran-gambaran yang jelas kepada pembaca sekaitan dengan pokok substansi penelitian ini.

Batasan masalah dibuat dengan maksud agar penelitian ini tidak jauh dari pembahasan-pembahasan inti yang sinkron dengan judul penelitian itu sendiri. Batasan masalah ini juga akan memberikan arah, memudahkan pemahaman bagi pembaca, memberikan kesamaan persepsi dan menghindari kekeliruan terhadap penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban dari program opemerintah melalui PNPM mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masrakat di desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.
2. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban terkait dengan kondisi-kondisi yang dirasakan oleh masyarakat, setelah dilakukannya pemeberdayaan oleh PNPM mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat desa Bakti, kecamatan Ponrang Selatan, Kab. Luwu.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka perumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program pemerintah melalui PNPM Mandiri pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu ?
2. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat desa Bakti kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu dalam program PNPM Mandiri ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui program pemerintah melalui PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat desa Bakti kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu dalam program PNPM Mandiri.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan melahirkan hasil yang dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi civitas akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai program pemerintah melalui PNPM Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Bakti kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu.

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, pengalaman serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisa berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah secara umum, dan masyarakat di desa Bakti kecamatan Ponrang Selatan kecamatan Luwu secara khusus.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.**

Penelitian yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anjas Asmara dengan judul Implementasi Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi PMPN Mandiri berwawasan gender di kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur belum sepenuhnya maksimal dan perlu dilakukan pembenahan. Hal ini terlihat dari masih banyak kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya untuk itu, perlu adanya perbaikan dari anggaran, sosialisasi mengenai kebijakan, serta peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia yang menjadi agen pelaksana, agar kebijakan tersebut dapat tercapai dan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.<sup>11</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah dengan judul Efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di desa Botung kecamatan Kotanopan, kabupaten Madina. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah

---

<sup>11</sup> Anjas Asmara *Implementasi Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) (Studi Pada Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013)*, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016).

sangat efektif dalam menanggulangi kemiskinan di desa Botung, dimana di setiap variabel yang diteliti menunjukkan angka yang berkesimpulan pada sangat efektif, sedangkan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di desa Botung adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pemerintah, kerentnan umur, dan diri sendiri.<sup>12</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Eliyatidengan judul upaya PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Kebuyutan kecamatan Tirtayasa, kabupaten Serang. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Program PNPM Mandiri di lokasi penelitian sudah dijalankan dengan baik, program yang dijalankan meliputi dana bergulir. Program ini hanya sebagian kecil yang betul-betul bisa di manfaatkan oleh warga miskin. Terkait dengan PNPM bagi kesejahteraan program yang dilaksanakan berupa dana bergilir masih kurang membantu masyarakat, karena dana yang dikucurkan hanya sedikit sementara kebutuhan modal masyarakat sangatlah besar, sehingga belum mampu memberikan perubahan kesejahteraan yang mendasar bagi masyarakat.<sup>13</sup>
4. Skripsi yang ditulis Imam Al-Faqih dengan judul implementasi bantuan langsung masyarakat dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri di desa Sapeken, kecamatan Sapeken, kabupaten Sumenep. Penelitian ini mengungkapkan hasil dari penelitian ini

---

<sup>12</sup> Siti Aminah *Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Desa Botung Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Madina*, Skripsi (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2014).

<sup>13</sup> Eliyati “*Upaya PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang*” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012).

menunjukkan bahwa Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri) Di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan sarana prasarana dan simpan pinjam perempuan, pelaksanaannya tidak adanya transparansi oleh PNPM – Mandiri terhadap masyarakat.<sup>14</sup>

5. Skripsi yang ditulis Yossy Fransisca Valentina dengan judul analisis efektivitas pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan (studi kasus di kelurahan Bajang kecamatan Talun kabupaten Blitar tahun 2012). Penelitian ini mengungkapkan, 1) Pelaksanaan program simpan pinjam perempuan di Kelurahan Bajang telah berjalan dengan baik, dan sangat diminati oleh warga. Program ini telah menghasilkan 9 kelompok swadaya masyarakat, yang dalam 1 kelompok terdiri dari 5 sampai 20 orang. 2) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pinjaman bergulir adalah adanya kredit macet. Upaya menanggulangnya dengan membentuk tim pendamping lokal sebagai membina kelompok dan pengawasan. 3) Dampak adanya program simpan pinjam perempuan yaitu dana pinjaman digunakan oleh anggota untuk tambahan modal sehingga dapat meningkatkan usahanya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Imam Al-Faqih *Implementasi Bantuan Langsung Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep*, skripsi (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional, 2014).

<sup>15</sup>Yossy Fransisca Valentina, *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2012)*, Skripsi (Malang: Universitas Negeri Malang, 2014)

## B. Deskripsi Teori

### 1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

#### 1) Pengertian PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah<sup>16</sup> :

- a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM, mengacu kepada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan ideology pancasila,

---

<sup>16</sup> Panduan Teknis Operasional, *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri Perdesaan)*, (Jakarta: Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Republik Indonesia 2014), 2.



dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus terkait dengan sistem pemerintah, perencanaan keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan selengkapya sebagaimana berikut<sup>17</sup>:

- a. UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
- b. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- c. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- d. PP. No 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- e. PP No. 52 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan.
- f. PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
- g. PERPRES No. 54 Tahun 2005 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- h. KEMENKEU No. 523 Tahun 2000 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- i. PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa
- j. UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public
- k. PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- l. PTO PNPM MANDIRI tentang PNPM Mandiri perdesaan tahunn 2008.

## 2) Tujuan PNPM Mandiri<sup>18</sup>

- a. Tujuan umum

---

<sup>17</sup> Scribd, *UU\_PP\_PERPRES\_KEPMEN\_PTO PNPM*, diunggah oleh Aswan Kuswara, Juni 2009 dikutip pada 27 Agustus 2020, pukul 20.00.)

<sup>18</sup>Panduan Teknis Operasional, *Program Nasional Pemberdayaan*, 6.

PNPM Mandiri secara umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

b. Tujuan Khusus

- a) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;
- b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, terrepresentatif dan akuntabel;
- c) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*);
- d) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan;
- e) Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;
- f) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal; dan

- g) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri melakukan pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memerhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan<sup>19</sup>:

- a) Menggunakan kecamatan sebagai fokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program;
- b) Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal;
- c) Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya local dalam proses pembangunan partisipatif;
- d) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis; dan
- e) Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

### 3) Ruang Lingkup Kegiatan PNPM

Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:

- a) Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara pada karya;

---

<sup>19</sup>Panduan Teknis Operasional, *Program Nasional Pemberdayaan*

- b) Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini;
- c) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDG; dan
- d) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.<sup>20</sup>

#### 4) Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui PNPM Mandiri

Dalam hal menentukan kebijakan pemberdayaan setidaknya dapat terwujud tiga kebijakan utama dalam mewujudkan kebijakan pembangunan nasional yaitu

- a) Menetapkan suasana atau iklim untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat, baik potensi yang dimiliki alam maupun manusia;
- b) Memperkuat potensi yang telah terbentuk dalam masyarakat dengan memberikan bantuan dana, pembangunan sarana dan prasarana, serta lembaga pengembangan pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah; dan.
- c) Melindungi melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang. Dalam ketiga kebijakan utama tersebut tentunya akan memperkuat posisi tawar masyarakat untuk

---

<sup>20</sup> Tulisan Hukum/Infokum/Tematik, “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)” diakses pada tanggal 17 Juli 2019 dari <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/02/tulisan-hukum-PNPM-Mandiri2.pdf/>

mengembangkan potensi yang mereka miliki serta mewujudkan masyarakat yang mandiri dan kuat berlandaskan kebijakan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya, dalam mempengaruhi kebijakan yang berpengaruh pada lingkungan masyarakat, dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam melakukan kontrol atas permasalahan. Tolok ukur dalam pemberdayaan masyarakat adalah kemauan dan kemampuan anggota masyarakat untuk terlibat dalam proses pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat tidak membatasi keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses dan mekanisme pemberdayaan. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mempengaruhi kebijakan local.<sup>21</sup>

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

a) Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada

---

<sup>21</sup> Dave Adamson, 'Community Empowerment: Learning from Practice in Community regeneration'. *Journal of Public Sector Management*. Vol.1 No. 3. (2013), 190-202.

saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.<sup>22</sup>

b) Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen bantuan langsung masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.<sup>23</sup>

c) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

d) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Panduan Teknis Operasional, *Program Nasional Pemberdayaan*, 10

<sup>23</sup>Panduan Teknis Operasional, *Program Nasional Pemberdayaan*, 11.

<sup>24</sup>Panduan Teknis Operasional, *Program Nasional Pemberdayaan*, 13.

## 2. Pemberdayaan dalam Perspektif Islam

Pemberdayaan dalam Islam merupakan aspek muamalah yang sangat penting karenaterkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Di dalam al-Quran dijelaskan betapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukandengan salah satu cara di antaranya pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pemberdayaan. Sebagaiman firman Allah dalam QS. Ar- Ra“d/13: 11.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ  
 حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ  
 وَاٰلِ

Terjemhanya:

*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>25</sup>*

Dari ayat di atas sangat jelas Allah menyatakan, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya.

Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata “empowerment”. Menurut Mernam Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua pengertian, yaitu: 1) to give power atau authority atau memberi kekuasaan,

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (.....).

mengalihkan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, 2) to give ability to atau enable atau usaha untuk memberikan kemampuan. Dalam pengertian kedua kata tersebut, pemberdayaan diartikan memberi kemampuan atau keberdayaan kepada pihak lain yang tidak berdaya.<sup>26</sup>

Dalam pengertian lain menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat hakikatnya merubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.<sup>27</sup>

Pemberdayaan masyarakat dikonsepsikan sebagai suatu usaha untuk memberikan kekuatan, tenaga, kemampuan, mempunyai akal atau cara untuk mengatasi masalah dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan dikonsepsikan dalam dua hal pokok, yaitu:

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan kemampuan yang diharapkan, dan
- b. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungan secara mandiri.

Berdasarkan konsepsi pokok di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan wewenang kepada masyarakat

<sup>26</sup> Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 151.

<sup>27</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Jakarta: Alfabeta, 2014), 3



agar mampu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui berbagai kebijakan untuk mendorong masyarakat menuju kemandirian.<sup>28</sup>

Pengembangan masyarakat adalah sebuah usaha praktis untuk mengarahkan masyarakat kepada kemandirian, sehingga mereka mampu menganalisa sendiri isu-isu sosial serta dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka. Sebagai sebuah aksi sosial dalam menyelesaikan problem sosial, pengembangan masyarakat memberi perhatian yang besar pada perubahan masyarakat, yakni perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dimulai dari tingkat personal masyarakat, sampai pada level sosial melalui perubahan insitusi sosial yang ada dalam masyarakat. Perubahan menyangkut dua pelaku yang berbeda, yaitu masyarakat dan individu. Perubahan sosial harus diawali dari perubahan individu, dan secara berangsurangsur, perubahan individu harus disusul dengan perubahan struktural. Perubahan masyarakat akan terlaksana bila dipenuhi dua syarat pokok adanya nilai atau ide dan adanya pelaku-pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai tersebut. Pertama, manusia adalah pelaku yang menciptakan sejarah, tujuannya gambaran masa depan yang telah ada dalam benak manusia. Syarat kedua, perubahan masyarakat adalah adanya nilai-nilai atau ide. Nilai terpenting yang mendasari serta mengarahkan seluruh aktivitas manusia lahir dan batin.<sup>29</sup>

Salah satu upaya perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang nyata di tengah masyarakat. Kegiatan yang

<sup>28</sup> Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan.*, 149.

<sup>29</sup> Budi Cahyono, Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.15, No.1 (2014),5.

berupaya untuk menyadarkan masyarakat agar dapat menggunakan serta memilih kehidupannya untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik dalam segala aspek. Kajian dalam tulisan ini berusaha mengungkapkan makna pemberdayaan masyarakat dan halhal yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Al-Quran.<sup>30</sup> Selain dari pada itu dalam islam pemberdayaan merupakan salah satu proses tolong menolong antara sesama manusia. tolong menolong dalam kebaikan menuju kepada kesejahteraan bersama. Sebagaiman hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari,

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)

Terjemahnya:

*Dari Ibn Syihab, sesungguhnya Salim bin Abdullah telah mengkahabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya Abdullah bin Umar RA. mengabarkan, Rasulullah Saw.. bersabda, "Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Oleh karena itu, ia tidak boleh menganiaya dan menyerahkannya (kepada musuh). Barangsiapa memperhatikan kepentingan saudaranya, Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barangsiapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat kelak. Dan, barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat." (HR. Bukhari)*

Rasulullah Saw. mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong. Tolong menolong atau ta'awun merupakan keharusan bagi setiap orang. Karena manusia tidak bisa hidup di dunia tanpa pertolongan orang lain. Setiap pekerjaan, apapun bentuknya, pasti membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Di samping itu,

<sup>30</sup> Tomi hendra, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Quran, jurnal *hikmah*, volume 11 nomor 2, desember 2017, h. 192-193.

tolong menolong dibutuhkan tidak hanya dalam urusan pekerjaan, melainkan dalam hal-hal nasihat-menasihati dalam kebaikan, anjuran berbuat kebajikan, dan lain sebagainya.

### 3. Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “*catera*” yang berarti payung. Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.<sup>31</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak harus dicapai dalam aspek material saja tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat hanya akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia. Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. *World Health Organization* mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada terkait dengan tujuan, harapan standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi

---

<sup>31</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), 7.

oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.<sup>32</sup>

Dalam buku Harry Hikmat, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 pasal 1 ayat 1 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesucilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>33</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan seseorang yang mempunyai kehidupan perekonomian yang bebas dari kata kemiskinan atau bisa dikatakan seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh.

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan

---

<sup>32</sup> Agung Eko Purnama, "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Justicia Islamica*, Vol.11, No.1, (2014), 24.

<sup>33</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, 7

keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.<sup>34</sup>

Berdasarkan dengan uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa, standart dari kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

Kesejahteraan dalam pandangan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islam. Dalam pandangan syariah terdapat 3 segi sudut pandang dalam memahami kesejahteraan ekonomi yakni: Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar

---

<sup>34</sup> Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 03, No. 02, (Desember 2015), 381.

Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam Qs. Al Anbiya/21: 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>35</sup>*

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minallâh wa hablum minnan-nâs*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Quran*, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang

<sup>35</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (.....).

didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.<sup>36</sup>

Adapun Prinsip-prinsip kesejahteraan sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- b. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
- c. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat itu tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, intelektual atau akal. Al-Ghazali menitik beratkan sesuai tuntunan wahyu, kebaikan di dunia dan di akhirat merupakan tujuan utamanya. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah individu dan sosial yang meliputi kebutuhan pokok, kesenangan dan kenyamanan serta kemewahan.<sup>37</sup>

Beberapa faktor pendorong untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat yang sejahtera dalam konteks Islam adalah memenuhi kebutuhan dan bukan

---

<sup>36</sup> Ikhwani Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 85-87.

<sup>37</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2012), 62.

memenuhi kepuasan atau keinginan yang merupakan tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Al-Ghazali mendefinisikan bahwa aspek dalam ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yaitu kebutuhan (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniat*). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar itu terletak pada penyediaan tingkatan pertama yaitu kebutuhan terhadap pakaian, makanan, dan perumahan. Selanjutnya, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan dasar itu cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat serta dapat mencakup kebutuhan sosiopsikologis. Kebutuhan yang kedua yang terdiri atas semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima pondasi tersebut namun tetap dibutuhkan guna menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam menjalani hidup. Kebutuhan yang ketiga meliputi kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan yaitu hanya melengkapi, menerangi atau menghibur hidup.

Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin apabila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Pada dasarnya pencarian dari kegiatan ekonomi itu bukan hal yang diinginkan saja melainkan mencapai keselamatan dunia maupun akhirat. Al-Ghazali juga memandang perkembangan ekonomi itu sebagai tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*). Hal inipun sudah ditetapkan oleh Allah SWT apabila tidak terpenuhi maka kehidupan di dunia ini akan menjadi runtuh. Selanjutnya, Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada tiga alasan mengapa seseorang itu harus melakukan aktivitas ekonomi yaitu mencukupi kebutuhan hidup yang



bersangkutan, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan.

### *C. Kerangka Pikir*



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban dari upaya PNPM mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban terkait dengan kondisi-kondisi yang dirasakan oleh masyarakat, setelah dilakukannya pemberdayaan oleh PNPM mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin desa Bakti, kecamatan Ponrang Selatan, Kab. Luwu.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk mengembangkan penelitian ini, digunakan desain penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian ini berusaha menguraikan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>38</sup> Data ini berusaha menguraikan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data uji persyaratan dan interpretasi hasil penelitian.

Berdasarkan hal di atas, untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih terarah, maka desain penelitian ini disusun melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data berupa observasi, penyebaran angket dan wawancara, tahap pengelolaan data yang menyangkut pengklasifikasian data dan penyusunan hasil penelitian.

#### B. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan bagian yang sangat penting untuk memfokuskan penelitian ini.

- a. PNPM merupakan sebuah program nasional yang dipertunkkan kepada pemberdayaan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
- b. Program adalah rangkaian kegiatan yang telah direncanakan suatu kelompok masyarakat.

---

<sup>38</sup> Robert B. Dugan Steven J Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Cet. I; Surabaya: Usaha Nasional, 1993),30.

- c. Kesejahteraan merupakan keadaan yang menunjuk kepada hal yang baik, dimana kondisi manusia dalam keadaan makmur.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden dalam sebuah penelitian, subjek penelitian ini adalah pihak PNPM Mandiri, Pemerintah desa, dan Masyarakat miskin.

### D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian yang dilakukan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian hingga kurang lebih 1 bulan.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode, sebagai berikut:

- a. Metode *library research*

Proses pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur buku, majalah, dan internet yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah.

- b. Metode *field research*

Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan (objek penelitian), dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1) Observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki.<sup>39</sup> Interview (wawancara).

### 2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. Seperti kita lihat dengan lewat teknik wawancara, televisi, atau radio, merupakan teknik yang baik untuk menggali informasi di samping sekaligus berfungsi memberi penerangan kepada masyarakat.<sup>40</sup>

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

---

<sup>39</sup> Drs. Cholid Narbuko, Drs. H. Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Cet. XII ; Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), 70.

<sup>40</sup> Drs. Cholid Narbuko, Drs. H. Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, 83.

Dengan hal ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti, gambaran umum, struktur organisasi dan personalia, catatan-catatan, foto-foto dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.<sup>41</sup>

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik analisis penelitian ini menggunakan data analisis kualitatif model Huberman dan Miles yang terdiri dari tiga hal utama yakni reduksi data display data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan,<sup>42</sup> berikut di jelaskan mengenai teknik analisis penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi data, maksudnya proses pemilihan, pemusatan perhatian/pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan transformasi data mentah yang muncul atau terlihat dalam catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Display data/ penyajian data, maksudnya menyajikan data yang sudah direduksi atau kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

---

<sup>41</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143

<sup>42</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 408-409.

3. Verifikasi/ penarikan kesimpulan, maksudnya penarikan arti dari data yang telah ditampilkan atau disajikan. Dengan melakukan verifikasi, hasil penelitian tersebut telah memenuhi standar dan dapat dipertahankan.

### G. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara penelitian dibuat sebagai rujukan pertanyaan-pertanyaan yang peruntukkan menjawab penelitian ini kepada narasumber-narasumber yang terkait.

### H. Jadwal Kegiatan

#### 1. Tahap Persiapan Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Tahap Persiapan Penelitian

No	Kegiatan	Nov-19	Okt-19	Des-19	Jan-20			
					Pekan-1	Pekan-2	Pekan-3	Pekan-4
1	Penyusunan dan Pengajuan Judul							
2	Pengajuan Proposal							
3	Perizinan Penelitian							

#### 2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Tahap Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Feb-20				Mar-20
		Pekan-5	Pekan-6	Pekan-7	Pekan-8	Pekan-9
1	Observasi					
2	Pengumpulan Data					
3	Analisis Data					

## 3. Tahap Akhir Penelitian/Tugas Akhir

Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Jadwal Kegiatan Tahap Akhir Penelitian

No	Kegiatan	Hasil	Mar-20			
			Pekan-10	Pekan-11	Pekan-12	Pekan-13
1	Penyusunan Penelitian	Hasil	■			
2	Persentase Penelitian	Hasil				■



## BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

### A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Desa Bakti adalah salah satu Desa dalam wilayah Kecamatan Ponrang Selatan berada disebelah utara ibu kota Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Desa bakti merupakan desa Induk yang terpecah menjadi 4 (empat) desa. Yaitu Desa Olang, Desa Bassiang, Desa Bassiang Timur, dan Desa Lampuara. Sejarah pemerintahan di Desa Bakti sebagai berikut:

Tabel 4.1 Nama Kepala Desa Dari Tahun 1958-Sekarang

NO	MASA JABATAN / PEMERINTAHAN	NAMA KEPALA DESA
1	Tahun 1955s/d Tahun 1958	Abdul Rauf
2	Tahun 1958 s/d Tahun 1963	Tantu, B
3	Tahun 1963 s/d Tahun 1967	M. Runi
4	Tahun 1967 s/d Tahun 1973	Andi Halik
5	Tahun 1973 s/d Tahun 1979	Umar Nasir
6	Tahun 1979 s/d Tahun 1983	Andi Baso Suli
7	Tahun 1983 s/d Tahun 1986	Abdul Rahim K
8	Tahun 1986 s/d Tahun 1997	Salowong SP
9	Tahun 1997 s/d Tahun 2006	Baharuddin
10	Tahun 2007 s/d sekarang	Suaib

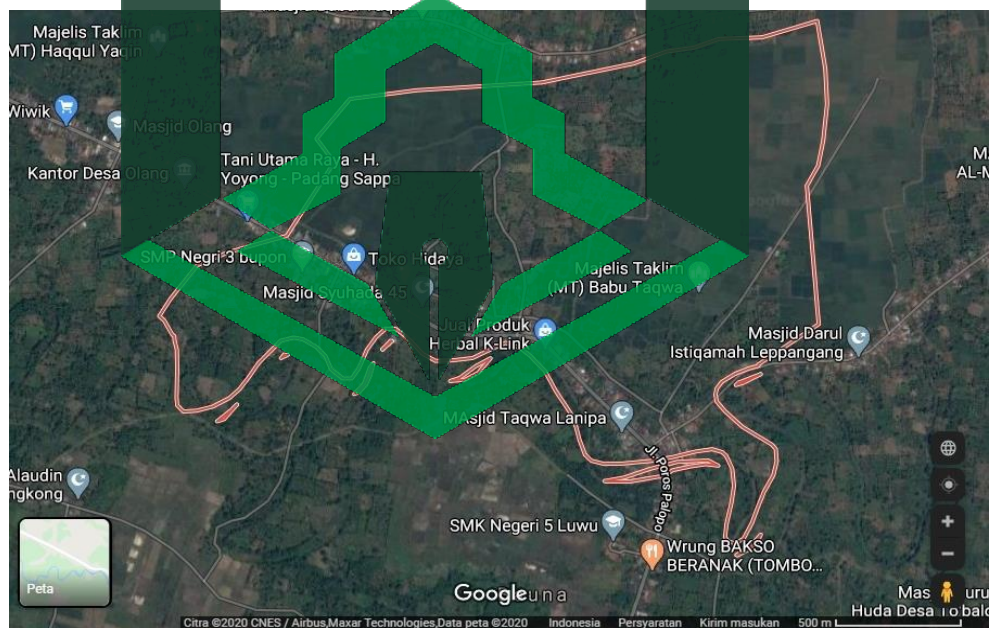
Sumber: Hasil Musrembang Desa Mandiri tahun 2016



## 1. Gambaran Geografis Desa Bakti

Luas Desa Bakti adalah  $\pm 6.850,60$  Ha, yang terbagi dalam 4 (Empat) wilayah kerja dusun yaitu Dusun Lanipa I, Dusun Lanipa II, Dusun Syuhada 45, dan Dusun Tondok Tangnga.

Desa Bakti merupakan Daerah dataran rendah, antara perbatasan desa Olang, Desa Lampuara, Dan kelurahan Pattedong, dengan ketinggian  $\pm 20-50$  meter diatas permukaan laut, Iklim Desa Bakti sama seperti desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni Kemarau dan Hujan. Desa Bakti mempunyai Luas Wilayah sekitar  $\pm 6.850,60$  Ha. Adapun batas-batas wilayah desa Bakti adalah:



Gambar 4.1. Peta Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu<sup>43</sup>

<sup>43</sup>Google Maps, Bakti Ponrang Sel., Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, <https://www.google.com/maps/place/Bakti,+Ponrang+Sel.,+Kabupaten+Luwu,+Sulawesi+Selatan/@-3.260586,112.3319482,2844m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x2d96ad7daad7957:0xc788ec883452057b!8m2!3d-3.2602964!4d120.3464333> (diakses 1 Maret 2020).

Tabel 4.2 Batas-batas Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Olang	Ponrang Selatan
Sebelah Selatan	Kelurahan Pattedong	Ponrang Selatan
Sebelah Timur	Desa Lampuara dan kelurahan pattedong	Ponrang Selatan
Sebelah Barat	Desa Olang	Ponrang Selatan

Sumber: Hasil Musrembang Desa Mandiri tahun 2016

## 2. Kondisi Demografi Penduduk Desa Bakti

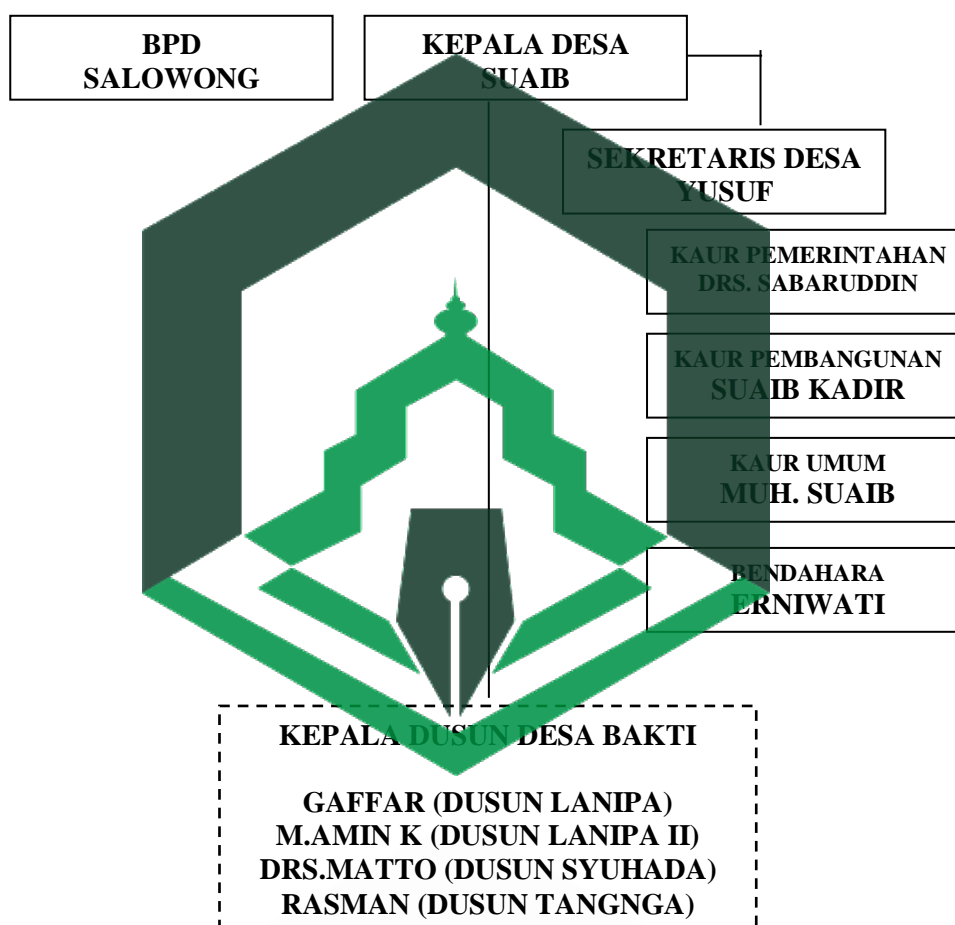
Penduduk Desa Bakti berjumlah 2.217 jiwa (Laki-laki dan Perempuan) dengan jumlah Kepala Keluarga 521. Masyarakat yang bermukim di Desa Bakti semuanya atau 99,8% menganut agama Islam dan terbagi dalam 4 (empat) suku yaitu Luwu yang merupakan suku mayoritas, suku Toraja, suku Bugis dan suku Makassar, meskipun terdapat 4 (empat) suku di daerah ini namun tetap hidup yang rukun. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih mengutamakan sikap kegotong-royongan dalam melaksanakan setiap kegiatan baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi seperti melaksanakan pesta pernikahan, penyelenggaraan kematian dan lain-lain. Dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat selalu dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Berikut data jumlah penduduk desa Bakti.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk 2010-2015 Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah Penduduk Thn.2010	1.040 Orang	1.090 Orang
Jumlah Penduduk Thn.2015	1.070 Orang	1.147 Orang

Sumber: Hasil Musrebang Desa Mandiri tahun 2016

### 3. Struktur Pemerintah Desa Bakti



Gambar 4.2 Struktur Pemerintah Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu

### 4. Potensi dan Masalah Ekonomi Masyarakat Desa Bakti

Desa Bakti merupakan daerah yang cukup potensial dan memberikan banyak keuntungan kepada masyarakat yang mau bekerja dan berusaha. Karena Desa Bakti merupakan daerah yang mempunyai lahan Perkebunan dan

persawahan. Dengan luas lahan perkebunan 2.300 Ha, sebagian masyarakat memanfaatkan lahan perkebunan mereka dengan menanam kakao, dan sebagian buah-buahan seperti durian, rambutan dan mangga. Dan ada tumbuhan yang sekarang telah mulai dikembangbiakkan oleh masyarakat yaitu nilam. Dengan luas area persawahan sekitar 3.448,6 Ha memungkinkan untuk produksi padi di Desa Bakti dapat menutupi kebutuhan pangan masyarakatnya dengan hasil rata-rata perhektarnya adalah sekitar 6,5 - 7 Ton.

Tabel 4.4 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu

Wilayah menurut penggunaan	Luas
Luas Pemukiman	1.000 Ha
Luas Persawahan	3.448,6 Ha
Luas Perkebunan	2.300 Ha
Luas Perkantoran	1 Ha
Luas Sarana Umum	101 Ha
Lainnya	
<b>Total Luas</b>	<b>6.850,60 Ha</b>

Sumber: Hasil Musrembang Desa Mandiri tahun 2016

Masyarakat desa Bakti memiliki mata pencaharian sebagai, petani sawah, kebun, ada pula sebagai peternak, PNS, pensiunan PNS/Polri/TNI, Pegawai/Guru Honorer, Tukang Ojek, Tukang batu/kayu, Wiraswasta, Pengusaha Meubel dan lain-lain:

Jenis pekerjaan pokok masyarakat :

Tabel 4.5 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	419 Orang
PNS	35 Orang
Guru/Peg.Honoror	68 Orang
Pensiunan PNS/TNI/polri	27 Orang
Tukang Ojek	15 Orang
Tukang batu/kayu	12 Orang
Pengusaha Meubel	3 Orang
Wiraswasta	58 Orang
DII / Tidak tetap	50 Orang

Sumber: Hasil Musrembang Desa Mandiri tahun 2016

Dengan berbagai potensi yang dimiliki Desa Bakti ada berbagai pengaruh fasilitas yang tidak memadai karena perkembangan perekonomian yang dialami masyarakat di desa berjalan tidak optimal. Adapun masalah yang dialami masyarakat :

**a. Bidang Prasarana**

- 1) Jauhnya Petani membawa hasil panen ke Jalan Desa / jalan raya.
- 2) Kondisi jalan banyak yang rusak/tidak lancar.
- 3) Transportasi antar dusun kurang lancar.
- 4) Lapangan Olah Raga yang belum memadai.

- 5) Beberapa areal yang tergenang air pada musim hujan.
- 6) Masih kurangnya penerangan lampu pada jalan poros dan Pasar.
- 7) Masyarakat belum menikmati air bersih yang siap konsumsi.

#### **b. Bidang Ekonomi**

- 1) Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam kurang nampak usahanya.
- 2) Masih rendahnya pendapatan masyarakat karena masih terbatasnya modal dalam mengembangkan usaha.
- 3) Masih banyaknya pengangguran karena terbatasnya peluang untuk melakukan usaha.
- 4) Hasil produksi panen padi dan coklat tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan petani.
- 5) Belum adanya inovasi dan kreasi kelompok tani, PKK dan Remaja.
- 6) SDM yang belum memadai dan terampil untuk life skill.
- 7) Tidak adanya sanggar tani sebagai tempat untuk diskusi.

#### **5. Kondisi Objektif PNPM Mandiri di Desa Bakti**

PNPM Mandiri pada dasarnya adalah program nasional yang dijalankan oleh semua kelompok untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan PNPM Mandiri dengan tujuan menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan, oleh dan untuk masyarakat yang didukung oleh berbagai kelompok atau pemangku kepentingan

lainnya. Aktor utama dalam pembangunan adalah rakyat itu sendiri. Pemerintah mendorong program nasional ini melalui pengembangan sistem dan desain program, penyediaan bantuan dan dana stimulan dalam wadah PNPM Mandiri yang akan mendorong inisiatif dan inovasi masyarakat dalam upaya mengurangi kemiskinan dan memperluas peluang kerja secara berkelanjutan.

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PKK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi sekelompok rakyat isiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

PNPM mandiri kecamatan Ponrang Selatan, yang dulunya berasal dari PPK kemudian berubah menjadi PNPM ke PNPM mandiri di zaman presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini telah berubah menjadi program dana desa di zaman pemerintahan presiden Joko Widodo.<sup>44</sup>

Dana yang dulunya untuk kegiatan PNPM mandiri kini beralih kepada dana desa, namun dana yang telah dikelola PNPM mandiri untuk saat ini telah dihibahkan dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK yang

---

<sup>44</sup>Wawancara A. Dinul Maheza Latanro, SH (Ketua BKD Kabupaten Luwu) (Pada 27 Februari 2020).

dimaksud merupakan utusan yang berada disetiap desa untuk merealisasikan dan bertanggung jawab atas dana yang dihibahkan pemerintah. Dana yang dikelola UPK PNPM se-kecamatan di kabupaten saat ini setara sekitar 1,5 Miliyar sampai 5 Miliyar per-UPK.<sup>45</sup>

Kegiatan PNPM mandiri sejak berawal bernama PPK telah banyak merealisasikan kegiatannya di desa Bakti. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari tahun 2002 sampai saat ini masih berjalan di masyarakat, di awal kemunculan PNPM mandiri kegiatan yang dilakukan didesa Bakti adalah pembangunan fisik dan penyaluran bantuan dana kepada masyarakat.

Namun saat ini pembangunan fisik tidak lagi dilakukan melalui PNPM mandiri karena telah di alihkan kepada program dana desa. Terlepas dari hal tersebut pengelolaan dana masyarakat tetap masih berjalan karena hal ini bersifat abadi karena dana yang disalurkan tetap berputar di masyarakat dan di manfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Walaupun dengan kondisi seperti pada umumnya dimana kebanyakan ketua kelompok dan masyarakat pengguna dana ini banyak yang tidak bertanggung jawab atas pinjaman yang diberikan.<sup>46</sup>

Ketentuan dasar PNPM mandiri perdesaan merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan dan pengawasan serta pelestarian. Ketentuan tersebut dimaksudkan dalam mencapai tujuan yang terarah.

---

<sup>45</sup>Wawancara A. Dinul Maheza Lantanro, SH (Ketua BKD Kabupaten Luwu) (Pada 27 Februari 2020).

<sup>46</sup>Wawancara Rizal Efendi (Sekretaris UPK PNPM Mandiri Ponrang Selatan) (Pada 25 Februari 2020).



Dalam seluruh kegiatan PNPM mandiri di desa Bakti sampai hari ini masih berjalan baik dari tingkat kabupaten sampai kepada ke tingkat desa. Hal ini dibuktikan masih terdapatnya pengolahan dana masih dilakukan UPK itu sendiri dan rapat koordinasi yang dilakukan oleh masyarakat baik di tingkatan desa sampai kepada tingkat kecamatan. Namun terlepas dari hal-hal tersebut untuk kondisi sekarang pemanfaatan dana bergulir masyarakat berupa simpan pinjam perempuan ada yang berjalan lancar sampai pada hari ini dan banyak jugayangmacet dikarenakan oleh pihak tersebut meninggal dunia, pihak meninggalkan desa Bakti dan juga usaha masyarakat macet.<sup>47</sup>

Kondisi PNPM mandiri di desa Bakti untuk saat ini ada terdapat wacana akan digabungkan dengan BUMDes yang ada di Bakti dan masih di dikelola oleh UPK. Untuk saat ini PNPM mandiri di desa Bakti dalam menyelesaikan persoalan dana macet yang ada di masyarakat akan dibentuk sebuah badan hukum yang mengikat masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi seenaknya menggunakan dana ini dalam artian tidak bertanggung jawab atas dipinjamnya dana ini. Dapat di katakan PNPM mandiri memang di peruntukkan kepada masyarakat, namun bukan berarti dana yang diperuntukkan kepada masyarakat tidak di mintai pertanggung jawaban. Inilah menurut Rizal Efendi PNPM mandiri di desa Bakti perlu dibuatkan badan hukum agar adanya ikatan kepada masyarakat.<sup>48</sup>

---

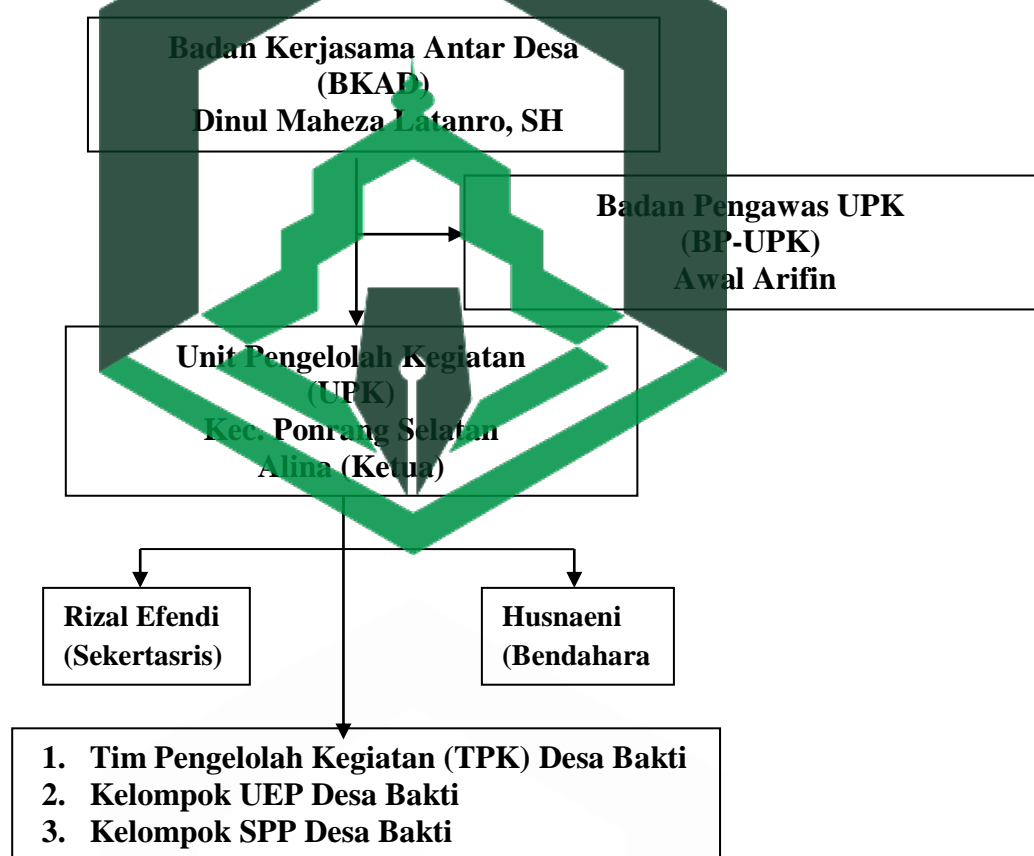
<sup>47</sup>Wawancara Arlina (Ketua UPK PNPM Mandiri Ponrang Selatan) (Pada 25 Februari 2020).

<sup>48</sup>Wawancara Rizal Efendi (Sekretaris UPK PNPM Mandiri Ponrang Selatan) (Pada 25 Februari 2020).

Dalam memanfaatkan dana bantuan langsung masyarakat, setiap desa mengajukan 2 usulan. Usulan yang dimaksud adalah meliputi, usulan kegiatan sarana prasarana dasar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat berupa kesehatan, pendidikan atau peningkatan kualitas keterampilan kelompok usaha ekonomi, usulan kegiatan simpan pinjam bagi perempuan yang ditetapkan dalam musyawarah desa khusus perempuan.

**a. Struktur Personalia PNPM Mandiri Kecamatan Ponrang Selatan**

Berikut ini gambar struktur personalia PNPM Mandiri Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu:



*Sumber Data : Arsip UPK Kecamatan Ponrang Selatan*

Gambar4.3 Struktur Personalia UPK Kecamatan Ponrang Selatan

### b. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Desa Bakti

Di desa Bakti terdapat 1 kelompok usaha ekonomi dan 2 kelompok simpan pinjam perempuan yang masing kelompok terdiri dari 10 orang dan tiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang ketua. Adapun ketua kelompok tersebut yaitu, bapak Akbhal untuk kelompok usaha ekonomi, Muliati untuk kelompok simpan pinjam perempuan di dusun Lanipa I dan Lanipa II, Suhuria untuk kelompok simpan pinjam perempuan di dusun Syuhada dan Tondok Tangga.

Berikut kelompok usaha ekonomi dan simpan perempuan di desa Bakti:

#### KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF DESA BAKTI

Ketua : Akbhal

Tabel 4.6 Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Desa Bakti

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman
1	Akbhal	Dagang	Rp 2,500,000
2	Bayu Hadi	Dagang	Rp 2,500,000
3	Fajar M.	Dagang	Rp 2,500,000
4	Rizki Kurnia	Dagang	Rp 2,500,000
5	Ari K.	Petani	Rp 2,000,000
6	Indra P.	Dagang	Rp 2,500,000
7	Aji Putra	Petani	Rp 2,000,000
8	Andi Fadel	Dagang	Rp 2,500,000
9	Ahmad K.	Petani	Rp 2,000,000
10	Rahim	Dagang	Rp 2,500,000
Jumlah			Rp 23,500,000

*Sumber Data : Arsip UPK Kecamatan Ponrang Selatan*

**KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN  
DUSUN LANIPA I DAN DUSUN LANIPA II DESA BAKTI**

Ketua: Muliati

Tabel 4.7 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Dusun Lanipa I dan Dusun Lanipa II Desa Bakti

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman	
1	Muliati	Dagang	Rp	2,500,000
2	Indah Dian	Dagang	Rp	2,500,000
3	Mayasari	Dagang	Rp	2,500,000
4	Sri Wahyunu	Dagang	Rp	2,500,000
5	Maya Lestari	Dagang	Rp	2,500,000
6	Ika A.	Dagang	Rp	2,500,000
7	Siti Rahimi	Dagang	Rp	2,500,000
8	Nuraini	Dagang	Rp	2,500,000
9	Dian Putri	Dagang	Rp	2,500,000
10	Fitri Nur	Dagang	Rp	2,500,000
	Jumlah		Rp	25,000,000

*Sumber Data : Arsip UPK Kecamatan Ponrang Selatan*

**KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN  
DUSUN SYUHADA DAN DUSUN TONDO TANGGA DESA BAKTI**

Ketua : Suhuria

Tabel 4.8 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Dusun Tondo Tangga dan Dusun Syuhada Desa Bakti

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman	
1	Suhuria	Dagang	Rp	2,000,000
2	Sulasi	Dagang	Rp	2,000,000
3	Futihah	Dagang	Rp	2,000,000
4	Sanah	Dagang	Rp	2,000,000
5	Maiya	Dagang	Rp	2,000,000
6	Hj. Aminah	Dagang	Rp	2,000,000
7	Salmah Rukmana	Dagang	Rp	2,000,000

8	Nur Hasanah	Dagang	Rp	2,000,000
9	Fatimah	Dagang	Rp	2,000,000
10	Supyanti	Dagang	Rp	2,000,000
Jumlah			Rp	20,000,000

*Sumber Data : Arsip UPK Kecamatan Ponrang Selatan*

Dari ketiga kelompok diatas dimana kelompok usaha ekonomi produktif dan kelompok simpan pinjam perempuan di dominasi oleh masyarakat dengan jenis usaha kepada perdagangan Dengan adanya dana bergulir tersebut masyarakat sangat terbantu dengan hal tersebut dikarenakan dana bergulir tersebut dijadikan sebagai penamabahan modal usaha bagi masyarakat.

#### **B. Program Pemerintah Melalui PNPM Mandiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bakti**

Kegiatan PNPM mandiri desa Bakti dikelola sesuai dengan panduan yang terdapat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Masyarakat desa Bakti sebelum merasakan kegiatan PNPM mandiri terlebih dahulu mengajukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh PNPM mandiri untuk mereka, sehingga kegiatan PNPM mandiri secara nyata dapat dirasakan dan tepat sasaran.

Tabel 4.9 Program Kerja PNPM Di Desa Bakti

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin		
				Meningkatkan kesejahteraan	Tidak berpengaruh	Menurunkan kesejahteraan
<b>Program Kerja Bidang Infrastruktur</b>						
1	Saluran Drainase	Dusun Lanipa dan Dusun Syuhada	Tinggi 70 Cm dan Lebar 90 Cm	✓		

2	Pengerasan Jalan Tani	Dusun Lanipa	Lebar 4 m dan Panjang 700 m	✓	
3	Pengerasan Jalan Pemukiman	Dusun Syuhada	Lebar 4 m dan Panjang 800 m		✓
4	Jembatan	Dusun Lanipa dan Dusun Syuhada	Luas 4x3 m Persegi	✓	
5	Taman Kanak-kanak	Desa Bakti	-	✓	
6	Posyandu	Desa Bakti	-	✓	
1	Usaha Ekonomi Produktif	Desa Bakti	10 Orang	✓	
2	Simpan Pinjam Perempuan	Desa Bakti	30 Orang	✓	

**Sumber Data : Hasil Penelitian**

Secara umum ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:

- 1) Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara pada karya;
- 2) Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini;

- 3) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target *Millenium Deveelop Ment Goals (MDGs)*; dan
- 4) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata **ke**pemerintahan yang baik.<sup>49</sup>

Berdasarkan dengan hasil temuan yang ada dilapangan berikut realisasi program PNPM mandiri di desa Bakti

### **1. Program Kerja Bidang Infrastruktur**

Pelaksanaan pembangunan infrastuktur PNPM mandiri di desa Bakti telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. PNPM mandiri memberikan bantuan dalam mewujudkan sarana prasarana guna peningkatan kualitas dasar hidup masyarakat, berupa pendidikan, kesehatan dan juga pengembangan ekonomi dilakukan secara partisipatif dan tepat sasaran.

#### **a. Pembangunan Saluran Drainase Bagi Petani**

Pembangunan drainase untuk desa Bakti sendiri dibangun dengan rabat beton berukuran tinggi 70 cm dan lebar 90 cm mengitari persawahan masyarakat desa Bakti. Drainase yang dibuat ini diperuntukkan untuk memaksimalkan volume air yang dibutuhkan oleh petani-petani yang ada di desa Bakti. Walaupun ada sebagian kecil lagi persawahan petani tidak mendapatkan fungsi maksimal dari drainase ini. Drainase yang dibangun dengan cara bertahap di 2 dusun desa Bakti. Mereka secara keseluruhan mengatakan bahwa dengan adanya program

---

<sup>49</sup> Tulisan Hukum/Infokum/Tematik, “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)” diakses pada tanggal 17 Juli 2019 dari <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/02/tulisan-hukum-PNPM-Mandiri2.pdf/>

pembangunan infrastruktur PNPM mandiri, seperti pembangunan drainase bagi petani, pengerasan jalan tani secara langsung sangat memberikan manfaat bagi mereka dalam melakukan aktifitas pertanian. Ayyub berpendapat bahwa saat ini setelah adanya program pembangunan drainase dari PNPM mandiri di desas Bakti petani lebih mudah mendapatkan pengairan ke sawah dengan adanya pembangunan drainase yang dilakukan oleh PNPM mandiri”<sup>50</sup> Selain dari pendapat sebelumnya, Jepri yang juga merupakan petani juga berpendapat bahwa keuntungan yang beliau dapatkan dari program PNPM mandiri di infrastruktur adalah mudahnya mereka mendapatkan akses langsung ke sawah mereka. Hal ini sangat membantu dan program yang sangat bagus karena menguntungkan masyarakat dari sisi pembangunannya terutama mendapatkan akses yang gampang ke sawah”<sup>51</sup>. Selain dari hal diatas pembangunan drainase dan perbaikan jalan tani ini memudahkan bapak Fikram mengakses lahan sawahnyadan mendapatkan air untuk sawah”<sup>52</sup>

Selain petani yang merasakan langsung pembangunan drainase oleh PNPM mandiri terdapat juga masyarakat yang langsung merasakan adanya drainase tersebut karena, menurut Fatmawati salah satu masyarakat yang langsung merasakan dampak pembangunan drainase yang dibuat, saat ini belakang rumah beliau tidak lagi digenangi oleh air hujan”<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara Ayyub (Petani) (Pada 26 Februari 2020).

<sup>51</sup> Wawancara Jepri (Petani) (Pada 28 Februari 2020).

<sup>52</sup> Wawancara Fikram (Petani) (Pada 27 Februari 2020).

<sup>53</sup> Wawancara Fatmawati (IRT) (Pada 28 Februari 2020).



### **b. Pengerasan Jalan Pertanian dan Pemukiman Masyarakat**

Pengerasan jalan tani dan jalan pemukiman di desa Bakti juga menjadi salah satu program yang diusulkan masyarakat kepada PNPM mandiri. Untuk luas jalan tani dan pemukiman warga ini selebar 4 meter dan panjang ruas jalan yang dilakukan pengerasan sepanjang 700 meter untuk pemukiman dan jalan tani sepanjang 800 meter. Jalan tani yang dimiliki oleh desa Bakti sebelumnya memiliki kondisi yang becek sehingga akses hanya dapat dilakukan oleh ojek gabah dan pejalan kaki. Dengan adanya program pengerasan jalan tani, saat ini sudah dimanfaatkan oleh pengepul untuk masuk menggunakan mobil. Jalan tani yang dulunya hanya bisa diakses oleh ojek gabah petani biasa memberikan tarif per/karung seberat 100 Kg gabah dengan harga Rp. 20.000 – Rp. 50.000 sesuai dengan jarak, dan kondisi cuaca pada saat itu sehingga ini membuat petani hanya akan mendapatkan keuntungan sedikit jika dibandingkan dengan adanya pengerasan jalan tani. Selain daripada itu adanya pengerasan jalan pertanian ataupun pemukiman warga ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. Ditambah lagi dengan adanya pengerasan jalan ini berbagai akses yang memfungsikan jalan tersebut memberikan kemudahan akses. Seperti yang dikatakan oleh Ayyub bahwa pengerasan jalan ini membantu akses ke sawah yang tadinya hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki atau menggunakan ojek gabah kini mobil dapat menjangkau sawahnya sehingga tidak lagi mengeluarkan uang atau biaya tambahan untuk membayar jasa tersebut.<sup>54</sup>

Disisi lain juga ada pengerasan jalan pemukiman menurut Fatmawati sebelum

---

<sup>54</sup>Wawancara Ayyub (Petani) (Pada 26 Maret 2020).



adanya pengerasan ini jalan tepat didepan rumahnya sangat becek sehingga akses menuju rumahnya sulit dan membutuhkan waktu untuk tiba dirumahnya.<sup>55</sup>

### c. Jembatan

Jembatan di desa Bakti yang dibangun oleh bantuan PNPM mandiri dengan ukuran luas 4x3 meter persegi. Jembatan ini dibangun dengan fungsi menghubungkan antar jalan yang ada di desa Bakti. Jembatan ini dibangun diantara jalan tani dan jalan pemukiman warga. Desa Bakti seperti yang dijelaskan sebelumnya diatas bahwa kendala yang dialami masyarakat adalah banyak jalan yang rusak sehingga akses bagi petani ke sawah biasa terhambat dan memakan waktu lama bagi mereka mengakses hasil panennya ke tempat pengumpul. namun saat ini seperti dalam keterangan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada petani-petani yang ada di desa Bakti. Jembatan ini merupakan penghubung antara beberapa jalan pemukiman dan jalan tani selain dari itu jembatan juga ini dijadikan sebagai penghubung antar drainase yang mereka.

Jembatan yang dulunya belum terbangun menghambat pengairan kesawah masyarakat, jembatan yang bangun ini memang tidak hanya berfungsi sebagai penghubung jalannya saja melainkan penghubung saluran air persawahan masyarakat. Jepri mengatakan bahwa pembangunan jembatan ini sangat membantu masyarakat baik itu untuk akses jalan juga untuk pengairan sawahnya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Wawancara Fatmawati (IRT) (Pada 28 Maret 2020).

<sup>56</sup>Wawancara Jepri (Petani) (Pada 28 Februari 2020).

#### **d. Pendirian Taman Kanak-kanak**

Pembangunan sarana prasarana untuk pengembangan kualitas hidup masyarakat pada kesehatan dan pendidikan juga merupakan salah satu program kegiatan PNPM mandiri di desa Bakti. Dengan bantuan pembangunan taman kanak-kanak di desa ini banyak masyarakat dapat memberikan pendidikan kepada anaknya yang berusia dini. Taman kanak-kanak di desa Bakti telah memiliki 50 peserta didik dengan jumlah honorer guru atau Pembina sebanyak 4 orang. Masing-masing sebagai kepala, wakil kepala merangkap pembina, sekretaris merangkap pembina dan bendahara di taman kanak-kanan desa Bakti.

Pembangunan taman kanak-kanak ini menurut Niar salah satu masyarakat desa Bakti mengatakan bahwa beliau “mendapatkan program yang bermanfaat seperti TK untuk menjadikan anak-anak mereka mampu bersosialisasi dengan sebayanya, dan belajar menghormati guru dan tentunya anak beliau dapat merasakan pendidikan usia dini di desa Bakti.”<sup>57</sup> Selain masyarakat merasakan dampak adanya TK ini, Desi Budi salah satu honorer TK desa Bakti juga menambahkan bahwa pembangunan ini sangat bermanfaat karena pembangunan TKnya selain untuk anak-anak juga sangat bermanfaat bagi beliau sebagai honorer di TK tersebut.”<sup>58</sup>

#### **e. Pembangunan Posyandu**

Selain dari pembangunan sarana prasarana pendidikan juga terdapat pembangunan sarana prasarana kesehatan masyarakat yang dijadikan sebagai salah satu pusat kesehatan masyarakat desa Bakti. Untuk respon sarana prasarana

<sup>57</sup> Wawancara Niar (IRT) (Pada 25 Februari 2020)

<sup>58</sup> Wawancara Desi Budi (Honorar TK desa Bakti) (Pada 28 Februari 2020).

untuk kesehatan masyarakat peneliti belum mendapatkannya namun, berdasarkan dengan kegiatan observasi yang dilakukan peneliti terkait dengan pembangunan posyandu desa Bakti, banyak masyarakat dapat merasakan langsung akses kesehatan tersebut. Untuk sumber daya manusianya sendiri posyandu ini memiliki 1 Bidan dan 3 perawat yang masih dalam status honorer.

## 2. Program Kerja Bidang Ekonomi

Pelaksanaan kegiatan berbasis ekonomi, atau yang biasa disebut dengan swadaya masyarakat dan desa merupakan program yang dilaksanakan oleh PNPM mandiri. Orientasi setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan atas keswadayaan dari masyarakat atau desa. Swadaya bisa diwujudkan dengan memberikan sumbangn dana maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Sekalipun keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, tetapi diutamakan swadaya bukan berasal dari rumah tangga miskin, kegiatan ini dilakukan melalui memberikan atau menyalurkan dana bantuan langsung masyarakat melalui program usaha ekonomi produktif.

Berikutnya program kerja PNPM dalam bidang ekonomi adalah memberikan keberpihakan kepada perempuan. Sebagai salah satu wujud itu adalah mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam dalam pengambilan keputusan pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Keberpihakan ini diwujudkan dengan salah satu program pengembangan ekonomi melalui simpan pinjam perempuan.

Program pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) dan simpan pinjam perempuan (SPP) dijalankan dalam satu periode yang telah

ditentukan. Dalam realisasinya kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahap yang telah ditentukan. Kelompok usaha ekonomi dan simpan pinjam perempuan merupakan dua jenis kelompok yang berbeda. Kelompok usaha bersama dan kelompok simpan pinjam. Pembagian ini merupakan langkah penguatan kapasitas dari kedua kelompok tersebut.

Program ini dalam realisasinya dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan musyawarah antar desa, musyawarah desa, musyawarah khusus perempuan, pengajuan proposal, tahapan verifikasi, musyawarah antar desa untuk prioritas usulan, musyawarah antar desa untuk penetapan usulan dan terakhir tahapan pencarian dan pengembalian dana pinjaman.

Dana ini akan dicairkan ke beberapa kelompok yang disetujui, kemudian dana yang telah dicairkan oleh UPK diserahkan kepada oleh masing-masing kelompok usaha ekonomi dan simpan pinjam perempuan. Dalam satu tahun pengembalian tersebut setiap bulannya akan dikenakan bunga 1% untuk tiap bulan pengembaliannya namun bersifat menurun.<sup>59</sup> Uang yang dikembalikan oleh kelompok SPP tersebut dikelola oleh UPK untuk digulirkan kembali kepada kelompok-kelompok yang lain.

Seperti yang diungkapkan oleh ketua kelompok SPP dusun Lanipa I dan Lanipa II, PNPM mandiri di desa bakti sudah membuktikan kemanfaatannya bagi masyarakat dengan pengimplementasiannya melalui program-program yang dapat memberdayakan masyarakat miskin dengan sangat baik. "PNPM sangat baik

---

<sup>59</sup>Wawancara A. Dinul Maheza Lantanro, SH (Ketua BKD Kabupaten Luwu) (Pada 01 Maret 2020).

karena memberdayakan masyarakat melalui berbagai program dan program SPP sangat membantu mengembangkan usaha dan kebutuhan hidup”.<sup>60</sup>

Pendapat lain dari ketua kelompok usaha ekonomi produktif bapak akhbal lebih lanjut menjelaskan bahwa PNPM mandiri di desa bakti sudah membuktikan diri dengan berbagai program, dana bergulir yang beliau peroleh dipergunakan untuk usaha kecil walaupun dana yang diperolehnya ada anggota kelompoknya hanya mendapatkan dana sebesar Rp.2.000.000. beliau mengatakan bahwa program PNPM mandiri desa Bakti memiliki program yang yang bagus bagi masyarakat. Beliau sendiri mengatakan bahwa dana yang diperolehnya berguna untuk modal usaha-usaha kecil yang dibangunnya sejak 10 tahun yang lalu, Walaupun tidak meratanya pembagian dana tersebut, PNPM mandiri sudah membuktikan melalui program-programnya”.<sup>61</sup>

Disi lain hal yang sama juga dikeluhkan oleh ibu Sulasi yang merupakan anggota kelompok penerima dana simpan pinjam perempuan, menurutnya bahwa dana yang digulirkan oleh PNPM mandiri di desa Bakti tidak merata kemasyarakat karena berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti memang pada kelompok ibu Sulasi hanya memperoleh dana sebesar Rp. 2.000.000. Namun terlepas dari hal tersebut dana yang diperolehnya tanpa jaminan itu sangat membantu usaha yang beliau jalankan. “Simpan pinjam perempuan PNPM yang di programkan PNPM itu sangat mudah didapat karena tanpa jaminan, dan

---

<sup>60</sup> Wawancara Muliati (Pengusaha Campuran) (Pada 25 Februari 2020).

<sup>61</sup> Wawancara Akhbal (Pengusaha Kecil) (Pada 29 Februari 2020).

pinjaman yang diberikan sudah cukup membantu kegiatan usaha kecil, namun negatifnya tidak meratanya dana bergulir ke masyarakat”.<sup>62</sup>

### C. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Program PNPM Mandiri di Desa Bakti

PNPM Mandiri adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, yang menitikberatkan pada upaya penguatan BKM (badan keswadayaan masyarakat) sebagai organisasi masyarakat yang mampu berperan sebagai penggerak upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.10 Kondisi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bakti

No.	Nama Masyarakat	Alamat Dusun	Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Miskin	
			Sebelum Program PNPM	Setelah Program PNPM
1.	Akbhal	Syuhada	Keterbatasan Modal Kerja	Peningkatan Omset
2	Bayu Hadi	Lanipa I	Keterbatasan Modal membuka Usaha	Memiliki Penghasilan
3	Fajar M.	Tondo Tangga	Keterbatasan Modal kerja	Peningkatan Omset
4	Rizki Kurnia	Lanipa II	Keterbatasan Penambahan Modal	Peningkatan Omset
5	Ari K.	Syuhada	Keterbatasan Produksi	Peningkatan Produksi Pertanian

<sup>62</sup> Wawancara Sulasi (IRT) (Pada 25 Februari 2020).



6	Indra P.	Lanipa I	Keterbatasan Modal Kerja	Peningkatan Omset
7	Aji Putra	Tondo Tangga	Keterbatasan Produksi	Peningkatan Produksi Pertanian
8	Andi Fadel	Lanipa II	Keterbatasana modal membuka usaha	Memiliki penghasilan
9	Ahmad K.	Syuhada	Keterbatasan Produksi	Gagal dalam meningkatkan produksi
10	Rahim	Syuhada	Keterbatasan modal kerja	Peningkatan Omset
11	Muliati	Lanipa II	Keterbatasana modal membuka usaha	Memiliki penghasilan
12	Indah Dian	Lanipa II	Keterbatasan modal kerja	Peningkatan Omset
13	Mayasari	Lanipa I	Keterbatasan modal kerja	Peningkatan Omset
14	Sri Wahyuunu	Lanipa I	Keterbatasana modal membuka usaha	Gagal
15	Maya Lestari	Lanipa II	Keterbatasan modal kerja	Peningkatan Omset
16	Ika A.	Lanipa I	Keterbatasana modal membuka usaha	Memiliki penghasilan
17	Siti Rahimi	Lanipa II	Keterbatasan modal kerja	Peningkatan Omset

18	Nuraini	Lanipa I	Keterbatasana modal membuka usaha	Gagal
19	Dian Putri	Lanipa II	Keterbatasana modal membuka usaha	Gagal
20	Fitri Nur	Lanipa I	Keterbatasana modal membuka usaha	Gagal
21	Suhuria	Syuhada	Keterbatasan modal kerja	Peningkatan Omset
22	Sulasi	Tondo Tangga	Keterbatasana modal membuka usaha	Gagal
23	Futihah	Syuhada	Keterbatasana modal membuka usaha	Gagal
24	Sanah	Syuhada	Keterbatasana modal membuka usaha	Gagal
25	Maiya	Tondo Tangga	Keterbatasan modal kerja	Peningkatan Omset
26	Hj. Aminah	Tondo Tangga	Keterbatasana modal membuka usaha	Gagal
27	Salmah Rukmana	Tondo Tangga	Keterbatasan modal kerja	Peningkatan Omset
28	Nur Hasanah	Syuhada	Keterbatasan modal kerja	Peningkatan Omset

29	Fatimah	Tondo Tangga	Keterbatasan modal kerja	Peningkatan Omset
30	Supyanti	Syuhada	Keterbatasan modal membuka usaha	Memiliki Penghasilan

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. *World Health Organization* mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.

PNPM mandiri di desa Bakti sudah memenuhi standar dari kesejahteraan yang mencakup tiga konsepsi, yaitu:

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
- b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti, di kemukakan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat desa Bakti setelah

dilakukannya pemberdayaan oleh PNPM mandiri, telah banyak sudah membantu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui berbagai program yang telah di implementasikan mulai dari membangun sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan akses pertanian serta bantuan dana untuk pengembangan usaha bagi pelaku ekonomi. Walaupun pada dasarnya PNPM mandiri di desa mampu mensejahterakan masyarakat dan belum mampu mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan secara keseluruhan. Setidaknya PNPM mandiri di desa Bakti sudah memberikan kebutuhan dasar dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang berkelanjutan. Dengan adanya PNPM mandiri di desa Bakti banyak kegiatan-kegiatan yang dulunya sangat sulit dan bahkan tidak bisa dilakukan, saat ini masyarakat desa Bakti secara bersama-sama dapat merasakan langsung hal tersebut.

Dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat miskin di desa Bakti, adalah dengan adanya bantuan langsung masyarakat berupa, pembuatan usaha dan penambahan modal usaha. Sejak tahun 2009-sekarang program tersebut masih dirasakan efeknya oleh masyarakat terutama masyarakat miskin.

Berdasarkan dengan hasil penelitian diatas, bahwa kategori penerima dana bantuan langsung masyarakat berupa pemberian dana usaha merupakan masyarakat yang terkategori miskin dan mampu di berdayakan menurut unit pengelola kegiatannya. Sebelum disalurkan dana tersebut seperti yang telah dijelaskan diatas memang ada beberapa mekanisme dan syarat yang harus di penuhi oleh masyarakat. Kelompok-kelompok penerima dana UEP dan SPP

misalnya pada akhir 2009 orang-orang dalam kelompok tersebut merupakan masyarakat miskin.

Dana bantuan langsung masyarakat yang disalurkan dengan metode dana bergulir yang bersifat abadi inilah yang masih dirasakan oleh masyarakat. Sejak 2009 dana ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat usaha dan juga menambah modal usaha. Hingga saat ini salah satu contohnya adalah ketua kelompok UEP, pada 3 tahun terakhir ini sudah mulai merasakan perkembangan usaha yang dibangun melalui bantuan dana PNPM mandiri pada tahun 2009 yang lalu. Belum lagi efek langsung yang diberikan kepada petani seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam hal pengurangan biaya produksi yang tidak lagi harus mengeluarkan dana untuk membayar jasa ojek gabah, tentunya hal ini dapat menambah pemasukan bagi petani.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu dilakukan dengan mengimplementasikan dua jenis program yaitu: a) Program Kerja di Bidang Infrastruktur, 1) Pembangunan Saluran Drainase Bagi Petani, 2) Pengerasan Jalan Pertanian dan Pemukiman Masyarakat, 3) Jembatan, 4) Pendirian Taman Kanak-kanak, 5) Pembangunan Posyandu, 5) Program Kerja di Bidang Ekonomi. b) Penyaluran dana kepada kelompok usaha ekonomi produktif, 1) Penyaluran dana kepada kelompok simpan pinjam perempuan
2. Kondisi kesejahteraan masyarakat desa Bakti kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu dalam program PNPM Mandiri, dapat disimpulkan bahwa PNPM mandiri telah banyak membantu memberikan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang telah di implementasikan mulai dari membangun sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan akses pertanian serta bantuan dana untuk pengembangan usaha bagi pelaku ekonomi. PNPM mandiri di desa Bakti sudah memberikan kebutuhan dasar dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang berkelanjutan. Dengan adanya PNPM mandiri di desa Bakti banyak kegiatan-kegiatan yang dulunya sangat sulit dan bahkan

tidak bisa dilakukan, saat ini masyarakat desa Bakti secara bersama-sama dapat merasakan langsung hal tersebut.

## **B. Saran**

Mengakhiri tulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembahasan dalam Skripsi ini masih terbatas pada penelitian yang dilakukan terhadap PNPM mandiri. Untuk itu diharapkan adanya pengkajian lebih mendalam dan pengembangan tulisan ini.
2. Kepada masyarakat secara umum, hendaknya lebih aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan pemberdayaan yang hampir setara dengan PNPM mandiri yang dilakukan oleh pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adamson. Dave, 'Community Empowerment: Learning from Practice ini Community regeneration'. *Juornal of Public Sector Management*.Vol.1 No. 3. (2013).
- Adisasmito.Wiku.*Sistem Kesehatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Al-Faqih. Imam *Implementasi Bantuan Langsung Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep*, skripsi (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional, 2014).
- Aminah.Siti *Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Desa Botung Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Madina*, Skripsi (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2014).
- Asmara. Anjas *Implementasi Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) (Studi Pada Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013)*, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016).
- Basri. Ikhwan Abidin, *Islam dan Pembngunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005)
- Cahyono. Budi, *Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.15, No.1 (2014)
- Chalid.Nursiah dan Yusbar Yusuf "Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau" *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22, No. 2 (Juni 2014).
- Eliyati "Upaya PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang" Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012).
- Hadi.Sutisno.*Metodologi Penelitian Research*, (Cet. II; Yogyakarta: UGM, 1997).
- Hendra.Tomi, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Quran*, jurnal *hikmah*, volume 11 nomor 2, desember 2017.



Huraerah.Abu.pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2011).

Khomsan. Ali. *Indikator Kemiskinan dan Misklasi Orang Miskin*, (Jakarta : Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2015).

M. Anwas. Oos, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Jakarta: Alfabeta, 2014).

Narbuko. Drs. Cholid. Drs. H. Abu Achmadi, “*Metodologi Peneletian*”, (Cet. XII ; Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012).

Panduan Teknis Operasional, *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM Mandiri Perdesaan)*, (Jakarta: Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Republik Indonesia 2014).

Purnama. Agung Eko.“Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Justicia Islamica*, Vol.11, No.1, (2014).

Pratama. Yoghi Citra “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 04, No.02 (Agustus 2014).

Progam Keluarga Harapan, *Meraih Keluarga Sejahtera*, [t.t.p]., [t.p], (2019).

Rubiyannah dkk, “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam Penanggulangan Kemiskinan (Kasus Pada Program Pinjaman Bergilir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)”, *Jurnal Management*, Vol. 2, No.2 (Maret 2016).

Sartika Cica. dkk, “Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 01, No. 01, (April 2016).

Setyobudi. Yustinus Farid. “Pengetasan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri” *Jurnal Dimensi*, Vol. 1. No. 3 (2016).

Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Surachman.Winamo.*Desain Tehnik Research*, (Bandung: Tarsito, 1997).

Sodiq.Amirus. “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 03, No. 02, (Desember 2015).

Suwandi, Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekon, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/ Kota Induk Provinsi Papua, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015).

Taylor. Robert B. Dugan Steven J, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Cet. I; Surabaya: Usaha Nasional, 1993).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1

Valentina. Yossy Franscisca. *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2012)*, Skripsi (Malang: Universitas Negeri Malang, 2014).

Internet :

Google Maps, Bakti Ponrang Sel., Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, <https://www.google.com/maps/place/Bakti,+Ponrang+Sel.,+Kabupaten+Luwu,+Sulawesi+Selatan/@-3.260586,-5,120.3319482,2844m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x2d96ad7daad7957:0xc788ec883452057b!8m2!3d-3.2602964!4d120.3464333> (diakses 1 Maret 2020).

Pemerintah Kabupaten Bulukumba, <https://bulukumbakab.go.id/rubrik/angka-kemiskinan-kabupaten-bulukumba-menurun> diakses pada 24 Desember 2019 pukul 17.09.

Pemerintah Kabupaten Luwu, “Tahun 2020, Pemkab Luwu Targetkan Angka Kemiskinan Turun 0,72 Persen” <http://mediacenter.luwukab.go.id/tahun-2020-pemkab-luwu-targetkan-angka-kemiskinan-turun-072-persen/>, dikutip pada 24 Desember 2019, pukul 19.22.

Scribd, *UU\_PP\_PERPRES\_KEPMEN\_PTO\_PNPM*, diunggah oleh Aswan Kuswara, Juni 2009 dikutip pada 27 Agustus 2020, pukul 20.00.)

Tulisan Hukum/Infokum/Tematik, “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)” diakses pada tanggal 17 Juli 2019 dari <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/02/tulisan-hukum-PNPM-Mandiri2.pdf/>

Wikipedia *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*  
[https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM\\_Mandiri\\_Pedesaan](https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan) (dikutip pada 25 Desember 2019, pukul 20.00.)

Narasumber:

Wawancara A. Dinul Maheza Latanro, SH (Ketua BKD Kabupaten Luwu) (Pada 27 Februari 2020).

Wawancara Rizal Efendi (Sekretaris UPK PNPM Mandiri Ponrang Selatan) (Pada 25 Februari 2020).

Wawancara Arlina (Ketua UPK PNPM Mandiri Ponrang Selatan) (Pada 25 Februari 2020).

Wawancara Ayyub (Petani) (Pada 26 Februari 2020).

Wawancara Jepri (Petani) (Pada 28 Februari 2020).

Wawancara Fikram (Petani) (Pada 27 Februari 2020).

Wawancara Fatmawati (IRT) (Pada 28 Februari 2020).

Wawancara Niar (IRT) (Pada 25 Februari 2020).

Wawancara Desi Budi (Honorer TK desa Bakti) (Pada 28 Februari 2020).

Wawancara Muliati (Pengusaha Campuran) (Pada 25 Februari 2020).

Wawancara Akhbal (Pengusaha Kecil) (Pada 29 Februari 2020).

Wawancara Sulasi (IRT) (Pada 25 Februari 2020).



# LAMPIRAN



## LAMPIRAN 1 (PEDOMAN WAWANCARA)

### PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

**“Upaya Program PNPM Mandiri Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)”**.

---

---

#### IDENTITAS NARASUMBER

Nama : .....

Umur : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Tanggal Wawancara: .....

**Personalia PNPM Mandiri/Pemerintah Setempat  
Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan**

1. Bagaimana latar belakang lahirnya program PNPM Mandiri Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ?
2. Apakah dasar terbentuknya PNPM Mandiri Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ?
3. Apa visi misi dari PNPM Mandiri Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ?
4. Apakah fungsi dari PNPM Mandiri Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ?
5. Bagaimana prosedur pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ?

6. Bagaimanakah sistem pengawasan kegiatan PNPM Mandiri Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ?
7. Bagaimana bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan PNPM Mandiri Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ?
8. Siapakah yang mengelolah dana PNPM Mandiri Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ?
9. Bagaimana rapat koordinasi antara PNPM Mandiri dengan Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ?
10. Manakah program unggulan dari PNPM Mandiri Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ?



## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

“Upaya Program PNPM Mandiri Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)”.

---

### IDENTITAS NARASUMBER

Nama : .....

Umur : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Tanggal Wawancara: .....

#### Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan

- a. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang PNPM Mandiri Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ?
- b. Apa keuntungan yang di dapatkan bapak/ibu dari PNPM Mandiri Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ?
- c. Apa dampak negatif dari kegiatan PNPM Mandiri Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ?
- d. Apakah visi misi yang dibuat oleh PNPM Mandiri Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu sudah terbukti terhadap masyarakat?
- e. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu dalam kegiatan PNPM Mandiri ?



## LAMPIRAN 2 (DOKUMENTASI WAWANCARA)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap mukrima Risal dilahirkan di Lanipa 19 Desember 1998 dan merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Risal dan ruskiati, Awali pendidikan formal di pendidikan sekolah dasar SDN 54 Lanipa (2006-2010) dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 3 Bupon (2010-2013). Penulis melanjutkan jenjang pendidikan formal sekolah menengah kejuruan di SMKN 1 TERPADU LUWU (2013-2016). Penulis masuk di fakultas ekonomi dan bisnis Islam institusi agama Islam negeri Palopo (IAIN PALOPO) Pada tahun 2016.

Untuk menyelesaikan studi di IAIN Palopo penulis melakukan penelitian dengan judul "program pemerintah melalui PNPM Mandiri pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi desa bakti kecamatan ponrang selatan)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.